

STANDAR – LAYANAN – INFORMASI - PUBLIK

PERMENKOMARVES NO. 10, BN 2022/NO. 1058, 23 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : Untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas diperlukan peningkatan standar layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 92 Tahun 2019; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020; Peraturan KIP No. 1 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:
Standar Layanan Informasi Publik yang terdapat di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mulai dari struktur kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tugas PPID, Petugas Pelayanan Informasi Publik serta Kepala Bidang yang membantu PPID. Pada Peraturan ini juga mengatur mengenai pemenuhan hak bagi setiap orang yang ingin memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan informasi publik. Selain permintaan informasi, pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam hal ditemukan penolakan, tidak disediakan, tidak ditanggapi, tidak terpenuhinya, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi publik melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri.

- CATATAN :
- Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2022;
 - Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Maritim No. 8 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lamp. : 23 hlm.